DAMPAK IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUM JASA TIRTA I DALAM PEMULIHAN MASALAH EKSTERNALITAS MASYARAKAT SEKITAR BENDUNGAN WONOREJO

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Miya Nurohmah
NIM 145020500111002

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

DAMPAK IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUM JASA TIRTA I DALAM PEMULIHAN MASALAH EKSTERNALITAS MASYARAKAT SEKITAR BENDUNGAN WONOREJO

Yang disusun oleh :

Nama	:	Miya Nurohmah
NIM	:	145020500111002
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 5 Juni 2018

Malang, 5 Juni 2018

Dosen Pembimbing,

Ajeng Kartika Galuh, SE., ME

NIP. 2012018512212001

Judul: Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perum Jasa Tirta I dalam Pemulihan Masalah Eksternalitas Masyarakat Sekitar Bendungan Wonorejo

Miya Nurohmah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: miya.nur.rohmah@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam suatu negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat pada negara tersebut. Perum Jasa Tirta I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola lima wilayah kerja yang telah diserah terimakan dari pemerintah. Diantara lima wilayah kerja tersebut, wilayah yang pertama diserah terimakan adalah Wilayah Sungai (WS) Brantas. Dari WS. Brantas, daerah yang cukup banyak mendapat perhatian perusahaan adalah Bendungan Wonorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk CSR Perum Jasa Tirta I dan mengetahui hasil dari penerapan PKBL untuk masyarakat di wilayah sekitar Bendungan Wonorejo. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan bahwa CSR Perum Jasa Tirta I yang disalurkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), memberikan bantuan kepada masyarakat wilayah sekitar Bendungan Wonorejo dalam menanggulangi eksternalitas yang dirasakan. Eksternalitas negatif yang terjadi diantaranya adalah pembebasan lahan dan relokasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada masa lampau, adanya alih fungsi lahan menjadi penginapan dan rumah makan, berubahnya sistem mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi pedagang hingga menjadi tenaga kerja di luar negeri, adanya perubahan sosial dan infrastruktur. Sementara eksternalitas positif diantaranya meningkatnya wawasan masyarakat seitar dan terbuka terhadap budaya luar, infrastruktur lebih baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja oleh Perum Jasa Tirta I menjadi karyawan di Bendungan Wonorejo. Hasilnya, program kemitraan memberikan bantuan permodalan dan pelatihan usaha kecil masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan. Pada program bina lingkungan, bantuan sarana prasarana ibadah meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah, program sarana prasarana umum membangun jalan desa sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat, serta bantuan lainya dalam rangka mendukung program-program positif masyarakat.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Bendungan Wonorejo, eksternalitas.

A PENDAHULUAN

Air sangat penting bagi kehidupan manusia (Anwar, 2013). Dalam undang-undang menjelaskan bahwa setiap sumber daya alam yang terkandung di Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan air adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam suatu negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat pada negara tersebut. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh perusahaan yang dibuat atau ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam tugas tersebut. Perum Jasa Tirta I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama di Indonesia yang mengelola sumber daya air, menjalankan fungsi pengendalian banjir, serta menjalankan usaha-usaha yang diatur dalam peraturan kementerian. Namun seiring dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan, eksternalitas sering kali terjadi. CSR *(Corporate Social Responsibility)* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dengan menanggulangi eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam hasil penelitian Sisinggih (2013) adalah adanya relokasi yang menyebabkan 995 kepala keluarga direlokasi pada Tahun 1980-an. Relokasi tersebut menyebabkan permasalahan emosional masyarakat. Masyarakat banyak mengalami kesulitan penyesuaian sosial ekonomi pada saat itu. Kurangnya tempat ibadah yang memadai dan perbedaan struktur masyarakat menjadi penyebab masyarakat harus menyesuaikan diri dengan sosial ekonomi di lingkungan baru. Pasca-relokasi, masyarakat memiliki penghasilan yang cukup rendah hingga sekitar Tahun 2005, setelah diresmikannya bendungan dan dipindah kelola oleh Perum Jasa Tirta I. Pemerintah juga memberikan janji kepada masyarakat agar memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera setelah relokasi. Dalam relokasi tersebut, pemerintah memberikan kompensasi tunai untuk ganti rugi tanah masyarakat. Skema kompensasi tunai ini kurang efektif diberikan dibanding skema tanah dengan tanah. Skema kompensasi tersebut kurang memberikan keuntungan kepada masyarakat petani yang ingin menubah pekerjaan (Fujikura, 2013).

Sisinggih (2013) menjelaskan bahwa pada awal relokasi, masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi dan emosional. Namun setelah tahun 2010-an, masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Terciptanya infrastruktur yang baik, rumah yang baik, pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak serta pendapatan yang lebih baik. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Hasil ini tak lepas dari Perum Jasa Tirta I yang menerima alih kelola dari pemerintah. Perum Jasa Tirta I melakukan aktifitas untuk memperoleh pendapatan dari Bendungan Wonorejo.

B TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Harta milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Namun demikian, cakupan keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah ini merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang dikelola pemerintah (Anto, 2003). Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 063/PUU-II/2004 menjelaskan penguasaan negara atas air meliputi kegiatan merumuskan kebijakan (*beleid*) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air, melakukan pengurusan (*besturrsdaad*) untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*wergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*) penggunaan sumber daya air, melakukan pengaturan (*regelendaad*) melalui kewenangan legislasi oleh DPR selaku pemilik kekuasaan legislatif bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah selaku pemilik kekuasaan eksekutif melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) melalui mekanisme kepemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN serta melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) oleh pemerintah terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya.

Eksternalitas

Eksternalitas menurut Fisher (1996) diartikan sebagai terjadinya aktifitas pelaku yang mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa lain yang terjadi di luar mekanisme pasar. Menurut Gruber (2010) eksternalitas tersebut memiliki dua dampak, yaitu berupa manfaat (yang menguntungkan) pihak lain dan yang merugikan pihak lain sebagaimana kurva berikut:

1. Eksternalitas Positif

Gambar 1: **Kurva Eksternalitas Positif**

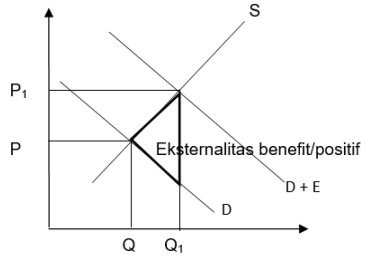

Sumber: Prasetyia (2013)

Eksternalitas positif ini diartikan sebagai tindakan pelaku (agen) ekonomi yang memberikan dampak berupa manfaat yang menguntungkan bagi pihak (agen) lain.

2. Eksternalitas Negatif

Gambar 2: **Kurva Eksternalitas Negatif**

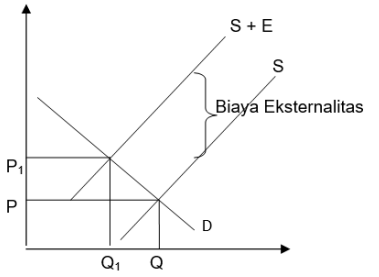

Sumber: Prasetyia (2013)

Eksternalitas negatif diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh agen/pihak lain di luar sistem pasar sebagai akibat dari aktifitas produksi. Namun biaya yang dikeluarkan masyarakat tersebut tidak termasuk dalam akumulasi biaya produksi perusahaan/pabrik.

Menurut Miller dan Meiners (2000) biaya pribadi yang dikeluarkan individu akibat adanya kerusakan sumber daya serta tidak dapat digunakan dengan baik berbeda dengan biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan. Masalah eksternalitas akan terjadi jika biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai pembuat kebijakan dalam perusahaan lebih kecil dari seluruh biaya yang ditanggung masyarakat sebagai pihak lain yang tidak terlibat dalam perusahaan.

Menurut Yuliati (2012), adanya pembangunan suatu proyek pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi manyarakat setempat, sehingga secara teori seharusnya suatu proyek berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.Studi tentang eksternalitas positif dan negatif yang dilakukan oleh Koeshendrajana, et al. (2009), sumber daya yang berbentuk waduk memiliki potensi strategis dan bermanfaat secara ekologi maupun ekonomi seperti pembangkit listrik, irigasi, pengendalian banjir, pariwisata dan utamanya di bidang perikanan.

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Upaya Menanggulangi Eksternalitas

Menurut Yudha (2016) bahwa aktifitas perusahaan menimbulkan eksternalitas bagi masyarakat, terutama di sekitar wilayah usaha hingga kemungkinan terjadi di dekat dengan perusahaan. Seiring dengan semakin besarnya aktifitas produksi dan konsumsi, maka eksternalitas yang dihasilkan semakin besar. Eksternalitas negatif yang dicontohkan sebagai limbah, sampah, polusi dan gas buang mencemari lingkungan, sehingga masyarakat mengeluarkan biaya sebagai akibat dari eksternalitas negatif tersebut. CSR merupakan penghubung antara perusahaan kepada masyarakat sebagai media dalam menginternalisasikan atau menanggulangi eksternalitas yang dibayarkan masyarakat ke dalam perusahaan. Karena itu, CSR prioritasnya diberikan kepada masyarakat di sekitar perusahaan.

Dalam penyaluranya, CSR memerlukan pemahaman dan penyesuaian yang baik terhadap kondisi masyarakat setempat karena masyarakat memiliki *local wisdom* yang berbeda-beda di setiap daerahnya (Budiarti dan Raharjo, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwasanya dalam realisasi anggaran CSR yang merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dilaksanakan oleh setiap perseroan dengan mendapat persetujuan dari dewan komisaris sebagaimana ditentukan oleh kementerian dalam undang-undang dengan anggaran dasar perusahaan, kecuali yang telah ditentukan perundang-undangan (Fitriansyah, 2015). Sedangkan untuk perusahaan BUMN, terdapat Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

CSR memiliki peran dalam mendukung program jangka panjang antara *stake holder* dengan lingkungan, masyarakat dan pembangunan. CSR menjadi fokus penting bagi perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen perusahaan yang baik dan berkelanjutan (Wiegel, 2013). Dalam Harijanti (2017) CSR memiliki tiga asas utama yaitu *sustanability*, *accountability* dan *transparancy*.

C METODE PPENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara/teknik yang mengarahkan peneliti untuk menentukan prosedur yang sesuai dalam memperoleh menganalisa hingga menyajikan data hasil penelitian (Wijaya, 2013).

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain eksploratif, bukan konklusif. Menurut Maholtra (2007) dalam Wijaya (2013), perbandingan desain riset eksploratif dengan dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 1: **Desain Riset Eksploratif**

Keterangan	Eksploratif
Tujuan Penelitian	Memperoleh wawasan dan pemahaman
Karakteristik Penelitian	Informasi lebih abstrak serta proses riset yang tidak terstruktur
Metode analisis data	Kualitatif
Temuan	Sementara
Hasil/*output* penelitian	Ditindak lanjuti konklusif

Sumber: Wijaya (2013)

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu CSR yang disalurkan melalui PKBL Perum Jasa Tirta I kepada masyarakat sekitar Bendungan Wonorejo serta analisis terhadap PKBL yang disalurkan kepada mitra binaan dan masyarakat di sekitar Bendungan Wonorejo sebagai media dalam menanggulangi eksternalitas yang terjadi akibat kebijakan terkait perusahaan.Ada tiga jenis informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci, informan pendukung dan informan tambahan sebagai berikut:

1. Informan kunci, yaitu orang yang memiliki berbagai informasi dan wawasan yang diperlukan
2. Informan pendukung, yaitu orang yang menerima rogram PKBL dan mengetahui informasi yang diperlukan terkait PKBL yang disalurkan. Informan pendukung meliputi:
   a. Pihak-pihak mitra binaan yang berasal dari sekitar Bendungan Wonorejo.
   b. Pihak penerima bantuan bina lingkungan dari wilayah kerja Bendungan Wonorejo.
3. Informan tambahan, yaitu penyalur PKBL di kantor *Control Building* Bendungan Wonorejo.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama (lapangan) sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yang sudah ada seperti jurnal, buku dan internet.

1. **Wawancara**
   Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pedoman tertulis tentang pertanyaan yang diajukan kepada narasumber (Wijaya, 2013).
2. **Observasi**
   Metode observasi dalam bentuk tidak terstruktur artinya peneliti berusaha mengamati semua aspek fenomena yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti (Wijaya, 2013).
3. **Dokumentasi**
   Menurut Nazir (2003) bahwa dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada pada pada masing-masing tempat kejadian.

D HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Perum Jasa Tirta I) merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air dan usaha lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pendirian perusahaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990 Tanggal 12 Februari 1990 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2010 Tanggal 3 Mei 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I, 2014).

Perum Jasa Tirta I adalah salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara yang menjadi 'tangan kanan' negara dalam pengelolaan sumber daya air di beberapa wilayah yang telah diserah terimakan. Begitu juga wilayah-wilayah operasional perusahaan juga merupakan hasil serah terima dari pemerintah, bukan atas sekehendak birokrasi perusahaan sendiri. Termasuk salah satu diantaranya adalah wilayah operasional Perum jasa Tirta I di Desa Wonorejo, yakni Bendungan Wonorejo yang merupakan hasil serah terima dari pemerintah kepada perusahaan.

Pembangunan bendungan ini dimulai Tahun 1994 hingga Tahun 2000 dan diresmikan pada tanggal 21 Juni 2001 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri. Pembangunan bendungan ini diperoleh dari anggaran APBN sebesar Rp. 77.000.000.000.000 beserta bantuan luar negeri dari *OECF (Overseas Economic Cooperation Fund)* Jepang sebesar ¥ 18,465 Milyar. Perum Jasa Tirta I menerima penyerah terimaan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang sebelumnya BBWS Brantas merupakan pihak yang dipercaya oleh Kementerian PUPR. Proses penyerah terimaan kepada dilaksanakan setelah peresmian yaitu Tahun 2002 hingga 2003 (Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I, 2015).

Gambaran Umum Wilayah Terdampak Eksternalitas Bendungan Wonorejo

Bendungan Wonorejo merupakan bendungan yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Desa yang terdampak adalah seluas Bendungan Wonorejo, yakni terdiri dari pembebasan lahan oleh Departemen Pekerjaan Umum, membebaskan satu desa dengan rumah-rumah penduduk sekitar 995 kepala keluarga, satu aliran sungai, dua pemakaman umum, lahan persawahan, perkebunan, hutan dan lahan peternakan. Proyek membawa dampak relokasi besar, sehingga sebagian besar masyarakat mengikuti transmigrasi bedol desa. Namun sebagian masyarakat tetap tinggal di sekitar wilayah yang tidak terdampak proyek tersebut (Sisinggih et al., 2013)

Sisinggih et al. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Resettlement Programme of The Wonorejo Dam Project in Tulungagung, Indonesia: The Perceptions of Former Residence"*meneliti masyarakat yang terkena dampak relokasi akibat pembangunan Bendungan Wonorejo sebagai salah satu proyek di Asia yang didanai dari investasi Jepang, mengatakan bahwa adanya relokasi menyebabkan masyarakat harus melakukan penyesuaian sosial dan ekonomi dengan lingkungan baru. Selain itu, adanya perbedaan infrastruktur baik pendidikan dan permodalan antara lingkungan yang lama dan lingkungan yang baru merupakan dampak yang menjadi permasalahan.

Dalam hasil penelitian Fujikura (2013) yang menjadikan Bendungan Wonorejo sebagai salah satu lokasi penelitian yang dibahas, bahwa pemerintah memberikan kompensasi tunai kepada masyarakat sekitar proyek yang direlokasi. *The Organization for Economis Co-operation and Development* lebih menyukai skema penggantian lahan dengan lahan dari pada skema kompensasi atau ganti rugi terhadap lahan dengan uang tunai. Dalam jurnal ilmiah tersebut menjelaskan bahwa skema tanah dengan tanah lebih baik karena adanya kompensasi dengan uang memberikan keuntungan yang kecil bagi petani yang ingin menubah pekerjaan mereka. Dari 995 kepala keluarga yang di relokasi dari satu desa, sebanyak 475 keluarga berpindah mengikuti transmigrasi dengan harapan kehidupan lebih baik. Sebanyak 356 kepala keluarga berpindah ke desa lain yang masih dekat dengan desa tempat tinggal lama mereka di sekitar proyek, sedangkan 165 kepala keluarga berpindah sangat dekat dengan proyek.

Sisinggih (2013) dalam Fujikura (2013) melakukan survey kepada keluarga yang terkena relokasi untuk mengetahui sejauh mana relokasi berdampak terhadap emosional keluarga karena terpisah dari

keluarga besar. Generasi pertama yang memutuskan untuk berpindah serta berpisah dari keluarga besar memutuskan untuk tidak melakukan perpindahan kembali (remigrasi) ke desa keluarga besar mereka. Sedankan 521 keluarga yang memilih berpindah ke desa sekitar proyek disebabkan karena mempertahankan kebersamaan keluarga besar. Hal ini dikatakan sebagai faktor emosional keluarga. Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan dalam kehidupan yang baru, pada saat penelitian dilakukan yaitu Tahun 2013, peneliti menatakan bahwa generasi kedua masyarakat itu mampu memiliki kesejahteraan yang meningkat, diukur dari tanah yang lebih luas, rumah yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.

Gambar 3: **Eksternalitas Proyek di Bendungan Wonorejo**

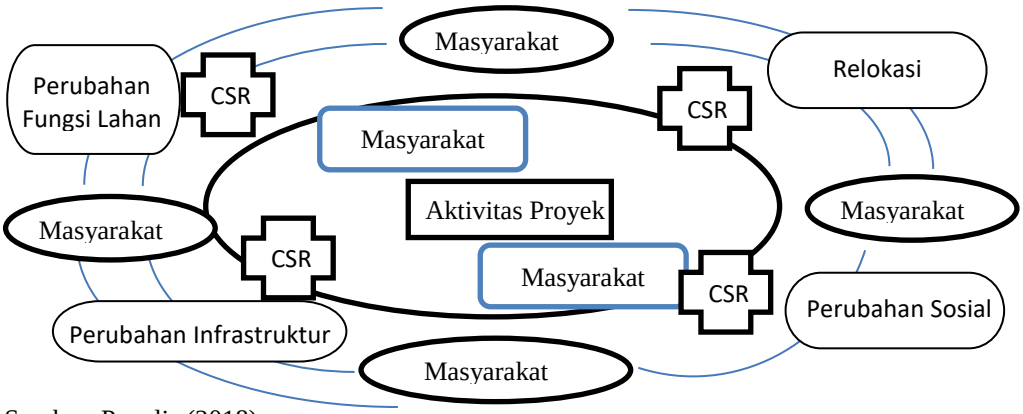

Sumber: Penulis (2018)

***Corporate Social Responsibility (CSR)* Perum Jasa Tirta I**

Program CSR Perum Jasa Tirta I yang dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) memiliki prinsip kesinambungan dan asas manfaat, pemerataan, efisiensi dan efektifitas. Dalam penyalurannya, dana kemitraan dan bina lingkungan ini menggunakan skala prioritas dengan cara menilai pihak mana saja yang lebih membutuhkan bantuan dana tersebut. Adapun aktivitas data persentase dari penyaluran CSR perusahaan sebagai berikut:

Tabel 2: **Persentase CSR yang Disalurkan**

Tahun	Laba Bersih	Dana kemitraan (1)	Bina Lingkungan (2)	Dana CSR (1) + (2)	Persentase
2013	61.950.000.000	2.150.000.000	390.000.000	2.540.000.000	4
2014	67.200.000.000	2.083.000.000	540.000.000	2.623.000.000	4
2015	75.628.880.000	1.980.000.000	586.500.000	2.566.500.000	3
2016	120.679.240.000	2.396.000.000	875.000.000	3.271.000.000	3

Sumber: Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I 2016, diolah 2018

Implementasi Program Kemitraan

Program kemitraan dilakukan dengan beberapa kegiatan pembinaan atau pelatihan dengan materi menyesuaikan dengan pemahaman mitra binaan, kunjungan kepada mitra binaan untuk membantu permasalahan yang dihadapi mitra binaan dan membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, pelatihan dan peninjauan hingga konsultasi permasalahan mitra binaan dilakukan secara periodik, berkelanjutan dan berkesinambungan serta melakukan pameran untuk mendorong kemajuan usaha mitra binaan. Pameran ini dilakukan dengan membawa produk-produk mitra binaan agar lebih dikenal masyarakat. Mekanisme penyaluran program kemitraan tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: **Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Kemitraan**

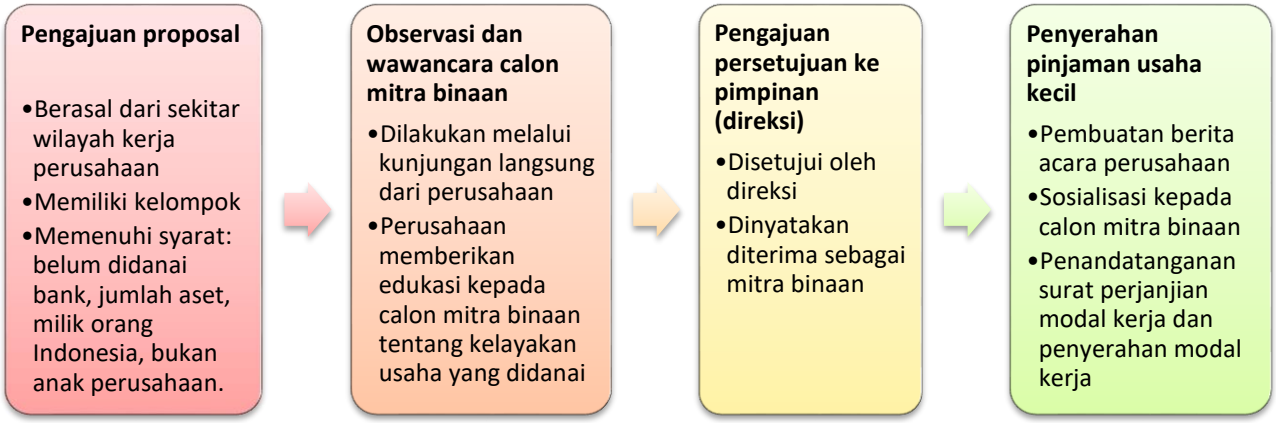

Sumber: Penulis (2018)

Program tersebut disalurkan kepada kelompok usaha yaitu beberapa kelompok *(cluster)* berikut:

Tabel 3: **Anggota Mitra pada Program Kemitraan**

No.	Kelompok Usaha	Lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten)	Anggota	Total Dana
1	Jasa dan Perdagangan	Nampu, Gemarang, Madiun	21	105.000.000
2	Perdagangan dan Industri Mebel	Kalipang, Sutojayan, Blitar	6	46.000.000
3	Industri Jajanan Khas Trenggalek dan Sanitair Beton	Bendorejo, Pogalan, Trenggalek	23	410.000.000
4	Perdagangan, Peternakan dan Jasa	Karangsono, Kanigoro, Blitar	11	180.000.000
5	Perdagangan, Industri dan Jasa	Kecamatan Oro-oro Dowo, Kota Malang	19	320.000.000
6	Perdagangan	Lengkong, Mojoanyar, Mojokerto	8	105.000.000
7	Jasa dan Perdagangan	Dadaprejo, Junrejo, Batu	5	65.000.000
8	Perdagangan	Pajaran, Saradan, Madiun	14	140.000.000
9	Industri Rengginang, Perdagangan dan Jasa	Sambigede, Sum-berpucung, Malang	13	195.000.000
10	Perdagangan dan Jasa	Karangkates, Sumberpucung, Malang	20	200.000.000
11	Perdagangan dan Jasa	Bandungrejo, Sukun, Kota Malang	8	149.000.000
12	Budidaya Lele, Perdagangan dan Jasa	Jegu, Sutojayan, Blitar	12	203.000.000
13	Peternakan Kambing, Industri Batako, Perdagangan dan Jasa	Bangles, Kanigoro, Blitar	9	144.000.000
14	Industri Kripik, Tahu, Perdagangan dan Jasa	Paniwen, Kromengan, Malang	13	134.000.000
Jumlah			182	2.396.000.000

Sumber: Laporan Tahunan PKBL Perum Jasa Tirta I Tahu 2016

Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan kontrol perusahaan kepada mitra binaan, memudahkan koordinasi dan memudahkan antar mitra binaan dalam melakukan diskusi dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Adapun data piutang bermasalah secara keseluruhan memiliki presentase sebagai berikut:

Tabel 4: **Besar Piutang BermasalahMitra Binaan**

Kualitas Pinjaman	Besar Piutang Perusahaan		
	2014	2015	2016
Lancar	3.059.000.000	2.267.000.000	2.771.000.000
	79.61999%	56.09998%	63.38060%

Kualitas Pinjaman	Besar Piutang Perusahaan		
	2014	2015	2016
Kurang Lancar	207.000.000	1.251.000.000	711.000.000
	5.38782%	30.95768%	16.26258%
Ragu	2.000.000	0	384.000.000
	0.05206%	0.00000%	8.78317%
Macet	189.000.000	139.000.000	106.000.000
	4.91931%	3.43974%	2.42452%
Sub Total	**3.457.000.000**	**3.656.000.000**	**2.771.000.000**
	89.97918%	**90.47266%**	**63.38060%**
Bermasalah	385.000.000	385.000.000	400.000.000
	10.02082%	9.52734%	9.14913%
Total	**3.842.000.000**	**4.041.000.000**	**4.372.000.000**
	100%	**100%**	**100%**

Sumber: Laporan Tahunan PKBL Perum Jasa Tirta I Tahun 2016

Pada umumnya, apa bila mitra binaan tidak mampu membayar pada saat bulan jatuh tempo, maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Tidak ada sanksi material atas keterlambatan pembayaran angsuran mitra.

Implementasi Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan (BL) ini disalurkan pada beberapa kegiatan. Jenis-jenis bantuan dan realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan (BL) secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 5: **Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan**

No.	Program Kegiatan	Tahun 1993 - 2015	Tahun 2016	Tahun 1993 - 2016
1	Bantuan Bencana Alam	237.618.000	49.200.000	268.818.000
2	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	609.745.000	18.750.000	628.495.000
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan	192.000.000	-	192.000.000
4	Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	2.372.967.000	416.500.000	2.789.467.000
5	Bantuan Sarana Ibadah	410.050.000	172.000.000	573.050.000
6	Bantuan Pelestarian Alam	-	-	-
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	-	60.000.000	60.000.000
8	Bantuan Pendidikan, Pelatihan dan yang terkait peningkatan kapasitas mitra	9.000.000	-	9.000.000
	Sub Total	3.822.380.000	716.450.000	4.538.830.000
9	Program Bina Lingungan BUMN Peduli	260.222.000	-	260.222.000
	Grand Total	4.082.602.000	716.450.000	4.799.052.000

Sumber: Data Laporan PKBL Tahun 2016 Perum Jasa Tirta I

Selanjutnya, penyaluran dana untuk program Bina Lingkungan dan dana yang tersedia digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 5: **Besar Dana Tersedia dan Dana yang Disalurkan Untuk Bina Lingkungan**

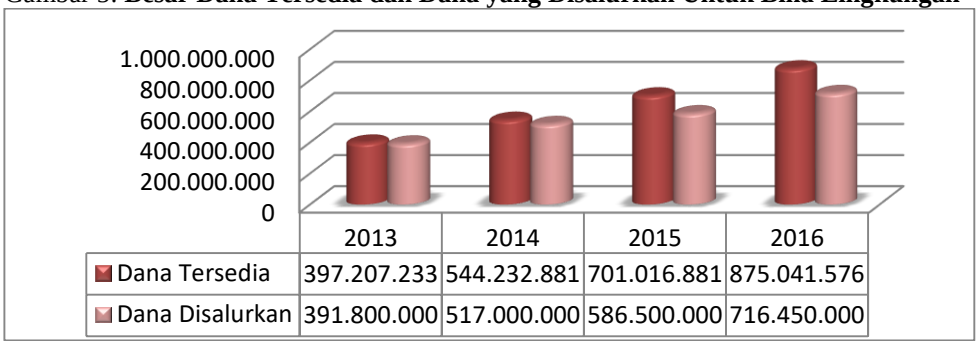

Sumber: Data Laporan PKBL Tahun 2016 Perum Jasa Tirta I

Dalam grafik diatas menunjukan anggaran yang akan disalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan dana disalurkan setiap tahunnya mengalami pengingkatan. Adapun untuk posisi keuangan PKBL pada akhir tahun 2016 (Periode yang berakhir 31 Desember 2016) sebagai berikut:

Tabel 6: **Posisi Keuangan PKBL Per 31 Desember 2016**

Uraian	Tahun	
	2015	2016
Kas dan Setara Kas	223.729.342	184.7100.768
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	3.509.104.693	3.846.795.461
Piutang Lain-lain (Jasa Administrasi Pinjaman)	20.889.200	20.182.800
Piutang Bermasalah	(384.685.516)	(400.119.687)
Jumlah	3.753.723.235	4.051.689.029

Sumber: Laporan Tahunan PKBL Perum Jasa Tirta I Tahun 2016

Program Bina Lingkungan merupakan program CSR perusahaan yang disalurkan untuk masyarakat umum di sekitar wilayah kerja perusahaan, tidak bersifat individu atau perorangan sebagaimana proram kemitraan. Perusahaan menerapkan empat kriteria menjadi penerima program Bina Lingkungan sebagai berikut (Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I 2016):

1. Perusahaan dapat menyerahkan bantuan ke wilayah/daerah penerima yang berada di seluruh wilayah Indonesia, namun tetap pada wilayah kerja perusahaan
2. Kedudukan penerima bina lingkungan adalah di sekitar kantor pusat (Malang), kantor perwakilan, kantor divisi jasa air dan sumber air dan prasarana pengairan perusahaan yang berada di wilayah kerja perusahaan. Ada dua prioritas kedudukan penerima ini yaitu:
    a. Prioritas I : Di dalam wilayah kerja perusahaan
    b. Prioritas II : Di luar wilayah kerja perusahaan
3. Penerimaan dana bina lingkungan dalam salah satu bentuk dari:
    a. Bantuan korban bencana alam.
    Penyaluran bantuan korban bencana alam dapat disalurkan tanpa adanya permohonan ataupun dengan adanya permohonan dari pihak yang mengalami musibah bencana. Bantuan ini dapat dirupakan sebagai bahan pokok atau dana.
    b. Bantuan pendidikan
    Bantuan ini diwujudkan melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan, menyesuaikan dengan permohonan yang diajukan. Bantuan ini juga dapat dirupakan dalam bentuk pelatihan.
    c. Bantuan peningkatan kesehatan
    Peningkatan kesehatan ini dilakukan melalui bantuan sarana prasarana kesehatan dan pemeriksaan kesehatan

d. Pengembangan sarana atau prasarana umum
   Bantuan ini diwujudkan melalui perbaikan sarana umum seperti jalan desa di daerah sekitar atau yang termasuk ke dalam wilayah kerja
e. Bantuan sarana ibadah
   Sarana ibadah yang sering mendapat bantuan perusahaan adalah masjid dan gereja. Bantuan ini dapat dirupakan dana untuk pembangunan masjid dan gereja atau menyesuaikan sesuai kebutuhan, misalnya tandon air, Al-Qur'an atau mukena. Bantuan ini juga merupakan wujud dari perusahaan dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan spiritual.
f. Bantuan pelestarian alam
   Pelestarian alam menjadi program yang rutin diberikan perusahaan. Penyebaran bibit ikan, bantuan kepada program kali bersih hingga kerja sama dengan program penanaman pohon bersama Perhutani.
g. Bantuan sosial kemasyarakatan.
   Bantuan ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Adapun bentuk bantuan ini sebagai berikut:
   1. Penyediaan listrik bagi daerah yang belum mendapatkan aliran listrik atau daerah yang dipandang perusahaan perlu bantuan tambahan aliran listrik
   2. Bantuan penyediaan air bersih di daerah yang dipandang memerlukan bantuan air bersih
   3. Bantuan penyediaan sarana MCK (Mandi Cuci Kakus) bagi daerah yang kekurangan atau minim sarana MCK
   4. Bantuan pendidikan, pelatihan, magang, promosi dan bantuan lain yang diperlukan dalam usaha peningkatan kapasitas usaha kecil yang tidak termasuk sebagai mitra binaan pada Program Kemitraan
   5. Bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu
   6. Bantuan pembibitan pertanian, peternakan dan perikanan untuk kebutuhan umum
   7. Bantuan peralatan usaha dan kerja jika dipandang perusahaan memerlukan bantuan

Pemberian bantuan dalam jenis apapun sebagaimana diatas harus dengan persetujuan direksi. Direksi menunjuk sekretaris perusahaan sebagai penanggung jawab Unit PKBL, sedangkan Unit PKBL sendiri merupakan unit yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana hingga pelaksanaan program kemitraan maupun bina lingkungan. Untuk mekanisme penyaluran bantuan proram bina lingkungan, perusahaan menetapkan beberapa tahapan yang digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 6: **Mekanisme Penyaluran Bantuan Bina Lingkungan**

Sumber: Penulis (2018)

Corporate Social Respponsibility **Perum Jasa Tirta I untuk Masyarakat Terdampak Proyek Sekitar Bendungan Wonorejo**

Perusahaan sangat mendukung adanya program-program positif yang dilakukan masyarakat. Perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat utamanya dari sisi kesejahteraan ekonomi dan mendorong kesejahteraan lain seperti kesejahteraan rohani dengan terlaksananya peribadatan dengan nyaman untuk masyarakat. Dalam adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pihak dari *Controll Building* Bendungan Wonorejo berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga melakukan seleksi sebelum proposal yang layak untuk didanai dikirimkan ke kantor pusat.

Pada masa relokasi (Tahun 1980-an) belum ada peraturan mengenai relokasi (pemindahan penduduk ke daerah lain yang telah ditentukan) sehingga sebagian kecil penduduk Desa Wonorejo melakukan transmigrasi dengan program pemerintah ke Pulau Sumatera dengan harapan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk memilih membangun rumah dan pemukiman pada lahan yang sudah mereka miliki sebelumnya secara syah di dekat rumah mereka yang semula, namun tidak termasuk lahan proyek. Pindahnya masyarakat ke pemukiman dekat proyek seperti ini memudahkan kontrol pembuat kebijakan untuk usaha peningkatan pendapatan.

Sejumlah 20 mitra binaan dari total 182 mitra binaan periode ini termasuk dalam *cluster* atau kelompok dari sekitar Bendungan Wonorejo. Program kemitraan tersebut bermanfaat bagi pemilik usaha kecil yang mengalami permasalahan kekurangan modal. Menurut Ibu Musti'ah, pengenaan biaya administrasi ini sangat kecil.

Dengan tidak adanya barang jaminan dalam peminjaman dana kemitraan, hal ini sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya agar bertahan dan mampu bersaing dengan produsen lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan narasumber yaitu Bu Musti'ah bahwa dana lunak dari perusahaan bermanfaat untuk permodalan usaha dan memberikan dampak dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Selaras dengan pendapat mitra binaan yang lain yaitu Ibu Siska yang memiliki usaha swalayan yang dijalankan saat ini, bahwa menjadi mitra binaan memiliki keuntungan tersendiri yaitu membantu perekonomian keluarga dan permodalan usaha yang dijalankan. Pada saat ditanya mengenai dampak atau keuntungan menjadi mitra binaan pada perekonomian keluarganya, bantuan perusahaan bermanfaat dalam membantu permodalan usahanya.

Perusahaan memberikan kemudahan bagi calon mitra binaan yang ingin memperoleh pinjaman dana lunak dengan cara mitra binaan tidak memberikan barang jaminan untuk memperoleh peminjaman dana lunak. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh nara sumber penerima mitra binaan yaitu Ibu Musti'ah pada saat diwawancara.

Tidak ada barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman dana mitra binaan. Namun dari hal ini, dimungkinkan adanya mitra binaan yang enggan membayarkan dana pinjamannya. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dibentuk kelompok-kelompok *(cluster)* di setiap wilayah terdekat sehingga antar mitra binaan dapat saling kontrol satu dengan yang lainya.Maka dari itu, selain memberikan pinjaman dana lunak kepada unit-unit usaha kecil, perusahaan juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan *pellet,* pelatihan pemasaran dan bantuan pemasaran untuk setiap kelompok mitra binaan.

Dalam satu kelompok yang terdiri dari bermacam-macam unit usaha, maka perusahaan harus menemukan terlebih dahulu kesamaan permasalahan yang dihadapi. Omzet Ibu Musti'ah yang berkisar Rp. 300.000 per hari, bahkan mencapai kisaran lima ratus ribu menurut suami beliau. Ibu Musti'ah sudah tiga periode menjadi mitra binaan Perum Jasa Tirta I. Namun karena sudah merasakan manfaat menjadi mitra binaan, Bu Musti'ah mengatakan kalau masih berminat untuk ikut dengan yakin.

Meskipun Ibu Musti'ah tidak dapat menggikuti setiap pelatihan yang diberikan perusahaan, namun antusiasme sebagai mitra binaan tetap terjaga. Hal ini sebagai bukti kalau usahanya, warung makan lesehan "Zakina" berkembang dan mampu bertahan dalam persaingan.

Sebagai perbandingan, berikut ini pendapatan harian kotor mitra sekitar Bendungan Wonorejo:

Tabel 7: **Persentase Kenaikan Pendapatan Mitra Binaan**

Nomor	Nama	Sebelum Menjaadi Mitra (Rp.)	Setelah Menjadi Mitra (Rp.)	Persentase kenaikan/penurunan
1	Musti'ah	150000	500000	303%
2	Katiyah	460000	750000	102%
3	Siska	250000	400000	98%
4	Sukaji	350000	500000	73%
5	Andik	960000	1100000	27%
6	Eka	190000	220000	29%
7	Ratnawati	140000	145000	7%
8	Ririn	170000	200000	33%
9	Titik L.	120000	135000	24%
10	Pak Rudi	600000	900000	83%
11	Baidah	2550000	3100000	39%
12	Suminah	270000	350000	52%
13	Purwanto	510000	700000	64%
14	Purwanti	300000	500000	107%
15	Sri	500000	700000	69%
16	Ida	760000	900000	34%
17	Rofiq Ali	180000	250000	67%
18	Kaseri	157500	245000	91%
19	Muyatin	970000	1020000	10%
20	Romadhon	470000	540000	28%

Sumber: Penulis (2018)

Hasil ini menjadi penunjuk bahwa mitra binaan perusahaan mampu berkembang dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam membina mitra usaha kecil di wilayah tersebut.

Implementasi Program Bina Lingkungan di Wilayah Sekitar Bendungan Wonorejo

Pada penerapannya, Program Bina Lingkungan untuk tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan alam sekitar, namun juga lingkungan kemasyarakatan. Pada awal penerapan program Bina Lingkungan ini, perusahaan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui agen sosial masyarakat seperti kepolisian setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya perilaku masyarakat yang *opportunist* (mencari keuntungan sendiri). Adapun program bina lingkungan yang dilaksanakan pada wilayah sekitar Bendungan Wonorejo dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut:

Tabel 8: **Penyaluran Program Bina Lingkungan**

No.	Nama Yayasan	Alamat	Kota / Kab.	Jenis Bantuan
1	Mushola Al-Hidayah	Dusun Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki	Tulungagung	Bantuan Dana
2	Musholla Al Mujahidin	Desa Samar Kecamatan Pagerwojo	Tulungagung	Panitia Renovasi Musholla Al Mujahidin
3	Masjid Al Huda	Dukuh Tawing Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki	Tulungagung	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid
4	PAUD An Nida	Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki	Tulungagung	Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Sarana Prasarana

No.	Nama Yayasan	Alamat	Kota / Kab.	Jenis Bantuan
5	Madrsaha Ibtidaiyah Miftahul Huda	Tanggulkundung - Besuki	Tulungagung	Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana
6	Madrasah Dini-yah Ula Zumro-tun Salamah	Desa Batangsaren Kec. Kauman	Tulungagung	Bantuan Rehabilitasi Bangunan Madrasah Dini-yah Ula Zumrotun Salamah
7	TK Gisik Sumunar Sidem	Dusun Popoh Desa Basole Kecamatan Besuki	Tulungagung	Bantuan Dana Pembangunan

Sumber: Perum Jasa Tirta I (2018)

Adapun untuk penyaluran program bina lingkungan ini dominan pada sarana ibadah. Bagi kelompok masyarakat yang menghendaki melakukan usaha pembukaan warung penyedia makanan untuk pengunjung Kawasan Wisata Bendungan Wonorejo, pihak waduk senantiasa terbuka luas untuk masyarakat. Adapun masyarakat yang melakukan usaha dagang ini terbuka melalui dua jalur. Untuk mitra binaan dari daerah Wonorejo, memiliki kelebihan pada ketertiban pembayaran angsuran bulanan. Hal ini menjadi nilai lebih apa bila mitra binaan ingin memperpanjang kontrak pembinaan usaha, karena mitra binaan di perusahaan ini bukan bersifat sesaat, namun bisa dalam jangka panjang agar lebih berkesinambungan. Perusahaan memberikan pelatihan bagi mitra binaan tersebut.

E PENUTUP

Kesimpulan

Perum Jasa Tirta I melakukan usaha pencegahan banjir dan usaha bisnis di Bendungan Wonorejo. Meski begitu, Perum Jasa Tirta I bukan pihak penentu kebijakan relokasi penduduk melainkan Kementerian PUPR lalu diserah terimakan kepada Perum Jasa Tirta I. Kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Akibat eksternalitas diantaranya:
   a. Pindahnya 995 kepala keluarga oleh Departemen Pekerjaan Umum
   b. Menghilangkan pemakaman, lahan sawah, kebun, hutan dan peternakan.
   c. Masyarakat memerlukan waktu lama untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan pemulihan emosional akibat berpisah dengan keluarga.
   d. Terjadi alih fungsi lahan menjadi tempat penginapan dan rumah makan, banyaknya lahan desa terdekat kawasan wisata ini menjadi objek investasi masyarakat luar daerah menyebabkan mahalnya harga tanah.
2. Bentuk penyaluran CSR memiliki dua program, yakni:
   a. Program Kemitraan (PK) memberi bantuan dana lunak untuk mitra binaan dan bantuanpelatihan pemasaran dan pengolahan produk mitra.
   b. Program Bina Lingkungan (BL) memberi bantuan korban bencana alam, pendidikan dan sarana prasarana pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, saranaprasarana umum dan ibadah, konservasi dan bantuan sosial masyarakatmembantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
3. Hasil dari keberhasilan pelaksanaan PKBL dapat diukur dari adanya:
   a. Dari Program Kemitraan (PK)didapatkan data ada peningkatan pendapatan mitra,meningkatkan kewirausahaan, membantu permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil produk mitra.
   b. Bantuan Bina Lingkungan (BL) sebagai pendorong kesejahteraan rohani karena terpenuhinya kebutuhan sarana ibadah yang baik dan nyaman, terpenuhinya sarana prasarana pendidikan seperti sekolah, Taman Kanak-kanak (TK) dan madrasah yang mendapat bantuan sarana

pendidikan, terjaganya ekosistem alam (hutan dan air) sekitar bendungan yang menjadi objek wisata serta terpenuhinya kebutuhan sarana umum seperti jalan desa.

Saran

Penyaluran *CSR* melalui PKBL memberi manfaat material dan non-material kepada masyarakat terdampak eksternalitas di wilayah sekitar Bendungan Wonorejo. Sebagaimana permasalahan yang paling sering dihadapi adalah adanya mitra binaan yang enggan membayarkan pinjaman dana, mamun perusahaan menerapkan sistem *cluster*/kelompok sehingga antar mitra binaan dalam satu kelompok dapat saling membantu serta mempermudah perusahaan dalam kontrol kelmpok mitra binaan.

Saran yang diperoleh dari pembahasan dalam penellitian ini adalah:

1. Bagi praktisi, dalam penyaluran program bina lingkungan perusahaan perlu memperhatikan juga beasiswa pendidikan, terutama untuk masyarakat dari wilayah perusahaan yang berupa pedesaan dan termasuk dalam desa yang memiliki potensi. Sebagaimana dalam Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung (2015) bahwa kabupaten ini berpotensi di bidang peternakan sapi perah, perikanan lele dan peternakan ayam. Program beasiswa pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan potensi yang dimiliki daerah.
2. Bagi pemerintah, penyaluran CSR seperti dengan PKBL ini berfungsi dalam membantu pemerintah menciptakan pembangunan nasional. Disamping BUMN *Award*, apresiasi pemerintah mungkin diperlukan untuk BUMN yang menjalankan CSR-nya dengan sangat baik, dinilai dari faktor yang menjadi pedoman sesuai dengan peraturan dari Kementerian BUMN No. PER-02/MBU/7/2017.
3. Bagi akademisi, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kebermanfaatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di wilayah Bendungan Wonorejo secara lebih luas dan menyeluruh. Selain itu juga diperlukan penelitian yang mampu menggangkat potensi wilayah tersebut, dimana hal itu tidak dibahas dalam penulisan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung selesainya penelitian dan penulisan ini, serta utamanya Bapak dan Ibu dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya serta Perum Jasa Tirta I yang mendukung penelitian dan pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. Ruslin dan Prastumi. 2013. *Pengembangan Sumber Daya Air.* Malang: UB Press.

Fisher, R. C. 1996. *State and Local Public Finance*. New York: Irwin.

Fitriansyah, Amran Hakim. 2015. *AnalisisPenerapan Corporate Social Responsibility pada PT. KeretaApi Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Iba Palembang.

Fujikura, Ryo dan Mikiyazu Nakayama. 2013. *The long-term impacts of resettlement programmes resulting from dam construction projects in Indonesia, Japan, Laos, Sri Lanka and Turkey: a comparison of land-for-land and cash compensation schemes. International Journal of Water Resources Development Vol. 29, 2013.*

Gruber, Jonathan. 2010. *Public Finance and Public Policy.* New York: Worth Publisher.

Harijanti, Sri. 2016. *Persepsi Stakeholders MengenaiKebermanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jasa Tirta I*. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Koeshendrajana, Sonny, Rizki Aprilian Wijaya, Fatriyandi Nur Priyatma, Pujoyuwono Martosuyono dan Sutrisno Sukimin. 2009. *Kajian Eksternalitas dan Keberlanjutan Perikanan di Perairan Waduk Jatiluhur*. Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP. Vol. 4 No. 2, 2009.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I Tahun 2014, *Water for Sovereignty The Food and Energy: Air untuk Kedaulatan Pangan dan Energi*. 2015. Perum Jasa Tirta I.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I Tahun 2015, *Transformasi Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Menunjang Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional: Transformation of Water Resource Management to Support National Food And Energy Sovereognity.*. 2016. Perum Jasa Tirta I.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta I Tahun 2016, *Semangat Pintu Air Dedikasi untuk Negeri: "Pintu Air" Spirits, Dedication for Our Nation*. 2017. Perum Jasa Tirta I.

Miller, Roger LeRoy dan Meiners, Roger E. 2000. *Teori Mikroekonomi Intermediate*. Edisi 1, Cetakan 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prasetyia, Ferry. 2013. Bagian V: *Teori Eksternalitas. Online: http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Eksternalitas.pdf.* diakses pada 6 November 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi 063/PUU-II/2004. Online: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/PutusanSDA.pdf. diakses pada 29 Oktober 2017.

Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraandan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Online: jdih.bumn.go.id/baca/PER-02/MBU/7/2017.pdf.

Sisinggih, Dian; Sri Wahyuni dan Pitojo Tri Juwono. 2013. *The Resettlement Programme of The Wonorejo Dam Project in Tulungagung, Indonesia: The Perceptions of Former Residence. International Journal of Water Resources Development, Vol. 29, issue 1 (March 2013) pp. 14-24.*

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wiegel, Kristian. 2013. *The Relationship Between Corporate Social Responsibility Reporting and Financial Performance: A Literature Study on The Explaining Factors.* Erasmus University Rotterdam.

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yudha, Tauchid Komara. 2016. *Memaknai Ulang Corporate Social Responsibility: Upaya Mewujudkan Fair Responsibility*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 19, No. 3, Maret 2016.

Yuliati, Dra. Sri Handaru, M.B.A. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Online: http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA4311-M1.pdf. Diakses pada 6 November 2017.

Sugiyono. 2014. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.